

Term of Reference (TOR)



**ROLE MODEL
PENINGKATAN PATROLI PERAIRAN BERSAMA MASYARAKAT**



**BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2017**

DOKUMEN ROLE MODEL BALAI TN KEPULAUAN TOGEAN

1. Judul Role Model	: Peningkatan Patroli Perairan Bersama Masyarakat
2. Pemrakarsa Role Model	
2.1. Kementerian/Lembaga	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2. Unit Kerja/Eselon I	: Direktorat Jenderal KSDAE
2.3. Satuan Kerja	: Balai TN Kepulauan Togean
3. Durasi Pelaksanaan	: 12 bulan (Tahun 2018)
4. Lokasi	: Resort Pasokan, SPTN III Popolii Resort Batudaka, SPTN I Wakai

5. Gambaran Umum Role Model

5.1. Latar Belakang

Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) memiliki luas kawasan luas 365.241ha, dimana 340.119 ha atau sekitar 93,12 % nya merupakan kawasan perairan. Ekosistem yang menjadi potensi andalan di kawasan perairan tersebut tentunya adalah ekosistem terumbu karang. Berdasarkan hasil kajian *Marine Rapid Assessment Program* (MRAP) di Kepulauan Togean terdapat sekitar 262 spesies karang dalam 19 famili pada 25 titik sehingga Togean kerap disebut sebagai "*the heart of coral triangle*". Selain itu terdapat sekitar 596 jenis ikan yang ada di TNKT serta mamalia laut yang juga dilindungi. Potensi SDA perairan tersebut menjadi salah satu latar belakang atau mandat penunjukkan TNKT yang menyebutkan agar menjaga keutuhan ekosistem pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayati laut dan darat yang tinggi termasuk dalam hal ini ekosistem terumbu karang. Dengan luas kawasan perairan yang cukup besar beserta potensi SDA laut nya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola TNKT mengingat jumlah SDM yang masih sangat terbatas khususnya tenaga polhut yang bertugas di bidang pengamanan kawasan. Hal ini ditambah dengan tekanan dari para oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan berbahaya untuk mengambil sumber daya hasil laut secara instan tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang. Dengan kondisi, tantangan dan permasalahan tersebut, maka upaya untuk menjaga keutuhan ekosistem khususnya wilayah perairan membutuhkan peran serta dan kerjasama dengan masyarakat

5.2. Tujuan

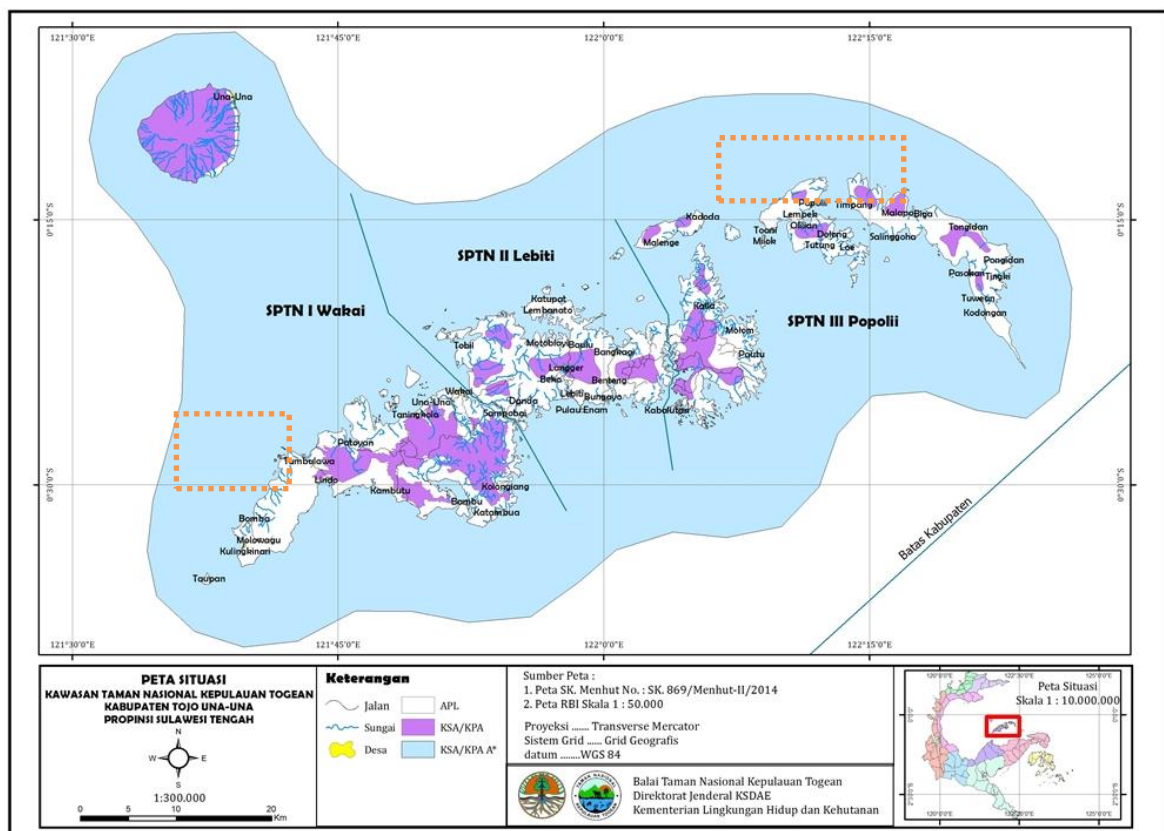
Diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam upaya penjagaan kawasan perairan sehingga gangguan keamanan di kawasan perairan dapat menurun dan aktivitas *destructive fishing* juga berkurang yang berimbas pada peningkatan hasil perikanan.

5.3. Kondisi Saat ini

- Masyarakat masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam termasuk hasil laut dan adanya beberapa oknum yang ingin mendapatkan hasil instan dengan konsekuensi kerusakan karang yang massif

- Gangguan terhadap kawasan khususnya aktivitas *destructive fishing* (pemboman, dan pembusukan) masih kerap terjadi
- Masih terbatasnya sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di sekitar TNKT
- Kawasan TNKT merupakan daerah terbuka (*open access*) sehingga memerlukan sarana prasarana dan SDM di bidang perlindungan dan pengamanan kawasan yang memadai
- Tenaga SDM Balai TNKT di bidang pengamanan/polhut masih sangat terbatas (13 orang) tidak sebanding dengan luas kawasan yang mencapai 365.241 ha
- Tenaga MMP yang berjumlah 3 orang di masing-masing SPTN dirasa masih kurang
- Upaya preemtif, preventif, dan represif sudah dilakukan oleh Balai TNKT. Upaya preemtif diantaranya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penanaman kesadaran konservasi sejak dini. Upaya preventif diantaranya dilakukan dengan patroli rutin, patroli perairan, patroli bersama MMP, rencana pengadaan speed patroli dan pembangunan pos jaga. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan mengenai suatu tindak pidana khusus serta potensi ancaman dan gangguan terhadap kelestarian kawasan serta kegiatan patroli dan atau operasi yang dilakukan oleh Balai TNKT bersama mitra maupun individu polisi kehutanan BTNKT.

5.4. Peta Lokasi



Keterangan :  lokasi Role Model

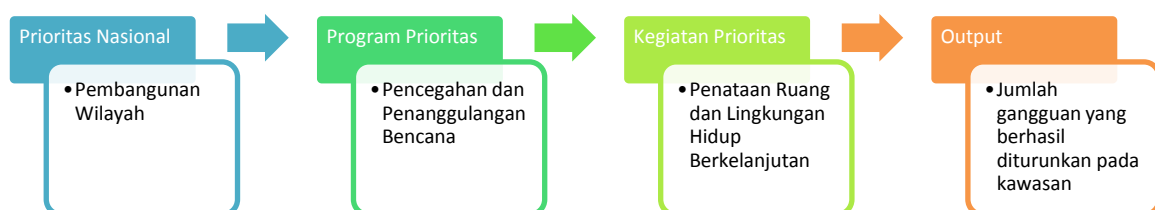
5.5. Kondisi yang diinginkan

- Adanya partisipasi aktif yang diwujudkan dengan menggalang kemitraan antara Polhut, POLRI, TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kemitraan ini ditumbuh kembangkan dalam pengelolaan pengamanan dan ketertiban lingkungan di kawasan konservasi.
- Setiap kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNKT selalu melibatkan mitra berupa Pemerintah Desa, Kecamatan, OPD Kabupaten yang terkait, Polres, Polsek, Pos Polisi di Desa, Polair Polda, Perwira Penghubung, Pos TNI AL, Babinsa, dan Masyarakat Partisipatif Polhut (MMP).
- Sistem pengawasan dan perlindungan kawasan tidak hanya semata oleh pihak Balai dan para mitra tapi masyarakat melalui MMP dan Pokmaswas dapat juga mengambil peran dalam sistem perlindungan tersebut (Gambar 2)
- Pokmaswas yang terbentuk dan diinisiasi oleh Balai TNKT dapat secara mandiri melakukan pengawasan lingkungan perairan yang tentunya difasilitasi sarana yang dibutuhkan dan sesuai dengan anggaran.

6. Keterkaitan dengan RENSTRA DITJEN KSDAE 2015-2019 dan/atau RKP 2018

Sebagaimana dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015 – 2019, salah satu IKK nya adalah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi. Salah satu Role Model yang diamanatkan kepada Balai TNKT yaitu Peningkatan Patroli Perairan Bersama Masyarakat tentunya sejalan dengan target IKK Ditjen KSDAE tersebut yang bertujuan untuk menjaga perlindungan dan pengamanan kawasan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Role Model Peningkatan patroli perairan bersama masyarakat di dalam Program/Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Balai TNKT 2018 masuk ke dalam output jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat dengan target 1 kejadian. Output tersebut di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 termasuk ke dalam Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah dan kegiatan prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.



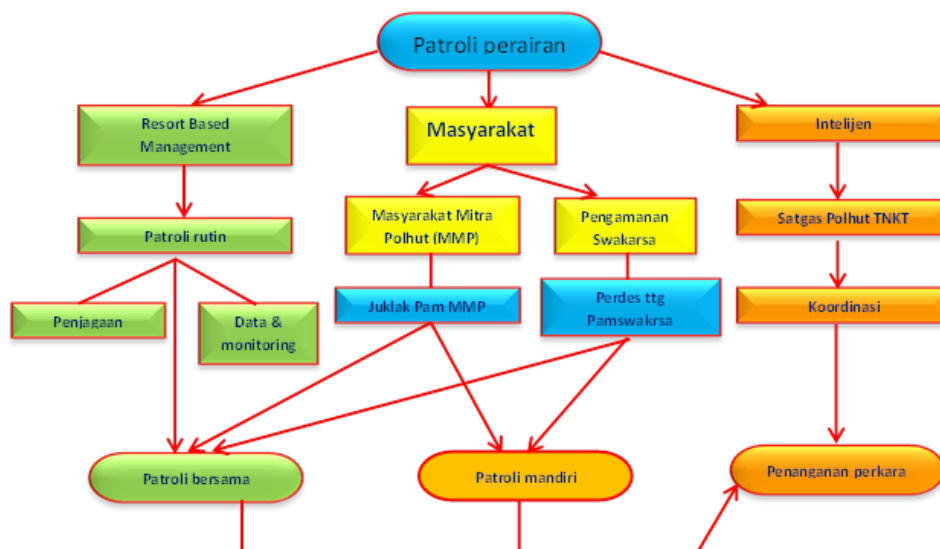
Gambar 1. Diagram Keterkaitan Role Model dengan RKP 2018

7. Indikator Pencapaian Proyek

	Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator
1. Output	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan patroli rutin bersama masyarakat Kegiatan patroli oleh MMP Terbentuknya pokmaswas Kegiatan patroli oleh Pokmaswas Pembangunan pos jaga Pengadaan Perahu dan mesin katinting 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan patroli dapat berjalan sesuai rencana Pokmaswas di beberapa desa Bangunan pos jaga dan perahu mesin katinting 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan patroli dan pengawasan secara berkala dilakukan Jumlah pokmaswas di Kep. Togeang meningkat Bangunan pos jaga di 3 lokasi Perahu dan katinting 6 unit
2. Outcome	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas <i>destructive fishing</i> menurun Masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan perlindungan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemboman dan pembiusan Keterlibatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemboman dan pembiusan menurun Jumlah masyarakat yang terlibat meningkat
3. Impact	<ul style="list-style-type: none"> Dampak Ekonomi Dampak Sosial dan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil tangkapan nelayan Pendapatan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> Data tangkapan ikan meningkat Pendapatan masyarakat meningkat

8. Analisis Role Model

8.1. Analisis Teknis



Gambar 2. Skema Role Model Peningkatan Patroli Perairan Bersama Masyarakat

Role Model peningkatan patroli bersama masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan Pengamanan swakarsa dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di samping tentunya kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh pihak Balai TNKT. MMP tersebut dalam kegiatan kegiatannya diatur dalam Juklak Pengamanan MMP yang dibuat oleh

Balai TNKT sedangkan Pamswaksa memiliki legalitas dari Desa (Perdes) yang tentunya difasilitasi oleh pihak Balai TNKT. Kegiatan patroli perairan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan secara mandiri ataupun melalui patroli bersama dengan pihak Balai TNKT.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan keamanan di kawasan perairan, berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan informasi (intelijen) dilaporkan ke satuan tugas Polhut TNKT untuk kemudian dilakukan koordinasi sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan penanganan perkara.

8.2. Analisis Dampak Ekonomi

- Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan patroli pengamanan akan mendapat tambahan penghasilan.
- Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam MMP akan mendapatkan bantuan operasional kegiatan.
- Masyarakat yang tergabung dalam Pokmaswas akan difasilitasi sarana prasarana pengamanan dan komunikasi.
- Lokasi tangkapan ikan tidak semakin jauh yang berpengaruh pada operasional bahan bakar minyak nelayan
- Hasil tangkapan nelayan dapat berkelanjutan, pendapatan nelayan dapat meningkat

8.3. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan

- Masyarakat dapat merasa terlibat dalam sistem yang dijalankan melalui role model ini.
- Kawasan perairan yang mendapat ancaman dari oknum nelayan akan lebih terawasi
- Laju kerusakan terumbu karang dapat ditekan

9. Tahapan-Tahapan Pencapaian Role Model

No	Tahapan Kegiatan	Tata Waktu
(1)	(2)	(3)
KEGIATAN PATROLI PERAIRAN BERSAMA MASYARAKAT		
1.	Kegiatan patroli perairan secara rutin.	Setiap Bulan
2.	Kegiatan Intelijen	Setiap Bulan
3.	Penambahan pos jaga perairan di titik-titik rawan	Maret - Mei 2018
4.	Pembentukan Pokmaswas di beberapa desa	Februari - Maret 2018
5.	Bantuan perahu dan mesin katinting kepada pokmaswas	Maret - April 2018
6.	Patroli mandiri oleh Pokmaswas	Setiap Bulan
7.	Bantuan Alat komunikasi (HT)	Februari 2018
8.	Sosialisasi dan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama (Anjingsana)	Setiap saat
9.	Patroli bersama MMP di masing-masing SPTN	Setiap Bulan

10. Keberlanjutan Role Model

Dukungan yang diperlukan :

- Anggaran yang mendukung role model ini (peningkatan patroli perairan bersama masyarakat) tersedia dan mencukupi
- Sarana speed patroli di masing-masing SPTN
- Tambahan SDM khususnya fungsional polhut
- Setiap petugas Balai TNKT, mitra dan masyarakat komitmen untuk menjalankan tahapan kegiatan role model ini

Untuk monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dalam laporan tersebut memuat hasil pantauan, kendala yang dihadapi, dan tindakan perbaikan.

11. Rencana Anggaran dan Biaya Role Model

No	Tahapan Kegiatan	Rencana Biaya	Identifikasi Mitra
(1)	(2)	(3)	(4)
KEGIATAN PATROLI PERAIRAN BERSAMA MASYARAKAT			
1.	Kegiatan patroli perairan secara rutin.	808.800.000 dan atau APBD	MMP, Pokmaswas, OPD terkait
2.	Kegiatan Intelijen	-	Babinsa, Masyarakat
3.	Penambahan pos jaga perairan di titik-titik rawan	218.400.000	Pemda
4.	Pembentukan Pokmaswas di beberapa desa	25.200.000 dan Dana desa	Camat, Kepala Desa, Masyarakat
5.	Bantuan perahu dan mesin katinting kepada pokmaswas	350.000.000	Pokmaswas, Kepala Desa, Dinas Perikanan
6.	Patroli mandiri oleh Pokmaswas	Swadaya dan atau Dana Desa	Pokmaswas
7.	Bantuan Alat komunikasi (HT)	30.000.000	Orari Kab. Touna, masyarakat
8.	Sosialisasi dan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama (Anjongsana)	-	Tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat di Kepulauan Togean
9.	Patroli bersama MMP di masing-masing SPTN	162.000.000	MMP
10.	Penyusunan Juklak MMP	-	-

Penanggung Jawab Usulan Role Model
Kepala Balai TN Kepulauan Togean

Ir. Bustang
NIP. 19641231 199203 1 058